

OPTIMALISASI PENGAMANAN ASET KENDARAAN DINAS DI KABUPATEN INDRAGIRI HULU PROVINSI RIAU

MUHAMMAD AL-WALY
NPP. 31.0155

Asdaf Kabupaten Indragiri Hulu, Provinsi Riau

Program Studi Keuangan Publik

Email: muhammadalwaly01@gmail.com

ayuwidowati@ipdn.ac.id

Pembimbing Skripsi: Ayu Widowati Johannes, S.STP, M.Si

ABSTRACT

Problem Statement/Background (GAP): *The government continues to increase asset utilization through the security process. One of the policies stipulated is the Minister of Home Affairs Regulation Number 19 of 2016 concerning Guidelines for Regional Property Management. This policy is expected to be a guideline for securing assets in each regional government, but in its implementation, there are still problems related to asset security. Purpose:* To describe the optimization of the security of official vehicle assets, analyze inhibiting and supporting factors, and describe BPKAD's efforts in overcoming problems. **Method:** *This research uses a descriptive-qualitative method with an inductive approach. Data collection techniques in this study use non-probability sampling or purposive sampling to select respondents. Data collection is carried out through observation and interviews. Result:* Regional asset management is still not well implemented. In the administrative security indicators, the recording and inventory of official vehicle assets have been managed optimally. **Conclusion:** *Security of official vehicle assets in Indragiri Hulu Regency, both administrative and legal security and physical security on official vehicle assets in Indragiri Hulu Regency, has not been optimal because there are still problems in every security in the form of lost proof of ownership, delinquent tax payments, ownership signs in the form of stickers that do not exist, and storage of goods in both parking lots and warehouses that are not optimal.*

Keywords: *Official Vehicles, Asset Management, Asset Security*

ABSTRAK

Permasalahan/Latar Belakang (GAP): Pemerintah terus meningkatkan pemanfaatan Aset melalui proses pengamanan, salah satu kebijakan yang ditetapkan yaitu Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Pedoman Pengelolaan Barang

Milik Daerah dimana kebijakan ini diharapkan mampu menjadi pedoman dalam pengamanan aset pada masing-masing Pemerintah Daerah, akan tetapi dalam pelaksanaannya masih terdapat permasalahan terkait pengamanan aset. **Tujuan:** untuk mendeskripsikan optimalisasi pengamanan aset kendaraan dinas, menganalisis faktor penghambat dan pendukung, serta mendeskripsikan upaya BPKAD dalam mengatasi permasalahan. **Metode:** Penelitian ini menggunakan metode kualitatif deskriptif dengan pendekatan Induktif. Teknik pengambilan data pada penelitian ini menggunakan non-probability sampling atau purposive sampling untuk memilih responden. Pengambilan data dilakukan dengan cara observasi dan wawancara. **Hasil/Temuan:** Pengelolaan aset daerah masih belum terlaksana dengan baik. Pada indikator pengamanan administrasi, pencatatan dan inventarisasi aset kendaraan dinas sudah terkelola dengan optimal. **Kesimpulan:** Pengamanan Aset kendaraan dinas di Kabupaten Indragiri Hulu baik administrasi, pengamanan hukum, pengamanan fisik pada aset kendaraan dinas di Kabupaten Indragiri Hulu belum optimal dikarenakan masih terdapat permasalahan pada setiap pengamanan baik berupa bukti kepemilikan yang hilang, pembayaran pajak yang menunggak, tanda kepemilikan berupa stiker yang tidak ada, serta tempat penyimpanan barang baik tempat parkir maupun gudang barang yang belum optimal

Kata kunci: Kendaraan Dinas, Pengelolaan Aset , Pengamanan Aset

I. PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Aset atau Barang Milik Daerah (BMD) dalam mendukung tugas dan fungsi Pemerintah dalam menyediakan layanan kepada masyarakat atau sebagai dasar tertib penyusunan laporan Pemerintah Daerah (Wicaksana, dkk., 2021). Pengelolaan aset daerah secara transparan, efektif, efisien dan akuntabel menjadi sebuah tuntutan dalam rangka mencapai tujuan ekonomi daerah. Oleh karena itu dalam pengelolaan aset perlu adanya peraturan agar dapat dilaksanakan dengan baik.

Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah sejak masa reformasi telah melaksanakan banyak inovasi serta perubahan dalam mengelola tata kelola pemerintahan. Pemerintah berupaya untuk meningkatkan pemanfaatan aset dengan membuat kebijakan-kebijakan yang berkaitan dengan proses pengamanan. Pengamanan merupakan paya untuk menjaga dan merawat semua aset daerah supaya tidak timbul masalah saat digunakan (Ilmiah, dkk., 2022). Menurut Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah dijelaskan bahwa “Pengamanan aset dilakukan dengan tiga cara yaitu pengamanan fisik, pengamanan administrasi, dan pengamanan hukum”.

Saat ini pengamanan aset daerah masih saja terdapat permasalahan meskipun telah ditetapkannya aturan terkait pengamanan aset oleh pemerintah. Proses pengamanan aset yang dianggap kurang penting oleh Organisasi Perangkat Daerah (OPD) merupakan salah satu persoalan yang terjadi menjadi salah satu faktor tidak tercapainya

pengamanan aset milik Pemerintah Daerah yang optimal dan berdampak pada saat pemanfaatan aset.

Kabupaten Indragiri Hulu adalah sebuah wilayah yang berlokasi di Provinsi Riau dan memiliki sejumlah aset daerah yang cukup melimpah, khususnya dalam bentuk aset tetap kendaraan dinas. Akan tetapi dalam pengelolaannya masih terdapat permasalahan pada pengamanannya. Tahun 2020 hingga tahun 2022 ditemukan banyak permasalahan pada pengamanan aset kendaraan dinas diantaranya yaitu aset kendaraan dinas yang dibawa oleh pegawai mutasi dan pensiun. Menurut laporan hasil pemeriksaan BPK tahun 2021 dan 2022 (s.d. semester I) ditemukan permasalahan terkait pengamanan aset kendaraan dinas yaitu 61 aset kendaraan dinas belum dikembalikan oleh pegawai mutasi dan 27 aset kendaraan dinas belum dikembalikan oleh pegawai pensiun serta belum terdapatnya kartu pemeliharaan yang dapat digunakan sebagai alat pengendalian biaya pemeliharaan untuk setiap kendaraan dinas (Badan Pemeriksa Keuangan RI, 2022).

Berdasarkan permasalahan pada aset kendaraan dinas di atas, maka perlu dilakukan pengoptimalisasian pengamanan aset kendaraan dinas dengan baik dan benar dikarenakan pentingnya aset kendaraan dinas ini sebagai penunjang kegiatan operasional yang dilakukan oleh pemerintah Kabupaten Indragiri Hulu dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat di Kabupaten Indragiri Hulu.

1.2. Kesenjangan Masalah yang Diambil (GAP Penelitian)

Terdapat permasalahan pada pengamanan aset kendaraan dinas di Kabupaten Indragiri Hulu dikarenakan kurangnya tanggungjawab oleh pengguna barang. Terdapat 88 aset kendaraan dinas yang masih dibawa oleh pegawai mutasi dan pensiun. Belum terdapatnya kartu pemeliharaan sebagai pengendalian biaya pemeliharaan serta belum optimalnya tempat penyimpanan barang aset kendaraan dinas di Kabupaten Indragiri Hulu dimana belum terjaminnya pengamanan kendaraan dinas berupa tempat parkir apabila meninggalkan kendaraan dinas di kantor serta gudang barang untuk kendaraan dinas roda empat yang rusak yang belum tersedia pada masing-masing OPD di Kabupaten Indragiri Hulu.

1.3. Penelitian Terdahulu

Penelitian ini terinspirasi oleh beberapa penelitian terdahulu dimana pengamanan aset merupakan suatu hal yang penting dalam menunjang kegiatan Pemerintah Daerah. Penelitian yang dilakukan Devi Refita Angreni (2022) berjudul “Optimalisasi Pengamanan Aset Tetap Daerah Oleh Pemerintah Kota Tanjungpinang Provinsi Kepulauan Riau“. Metode Penelitian yang digunakan yaitu Kualitatif. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana optimalisasi pengamanan aset tanah milik Pemerintah Kota Tanjungpinang

Penelitian yang dilakukan oleh Andry, dkk (2023) berjudul “Pelaksanaan Koordinasi Dinas Kesehatan Kota Pekanbaru dan Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Pekanbaru dalam Penghapusan Aset Kendaraan Dinas Operasional Khusus (*Ambulance*). Metode yang digunakan yaitu Kualitatif Deskriptif. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis dan menjelaskan pelaksanaan koordinasi Dinas Kesehatan Kota Pekanbaru dan Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Pekanbaru dalam penghapusan aset Kendaraan Dinas Operasional Khusus (*ambulance*).

Penelitian yang dilakukan oleh Khaerunnisa dan Hoerudin (2022) berjudul “Pengelolaan Kendaraan Dinas Dalam Mewujudkan Tertib Administrasi Pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Bogor”. Metode yang digunakan yaitu Kualitatif Deskriptif. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis dan mendeskripsikan pengelolaan kendaraan dinas dalam mewujudkan tertib administrasi pad BPKAD Kabupaten Bogor.

Penelitian yang dilakukan oleh Maria Paula Wambrau (2020) berjudul “Analisis Penatausahaan Aset Tetap Kendaraan Dinas Melalui Sistem Informasi Manajemen Barang Milik Daerah”. Metode yang digunakan yaitu Kualitatif dengan Studi Kasus (*case study*). Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis penatausahaan aset tetap kendaraan dinas melalui sistem informasi manajemen barang milik daerah dan penyebab permasalahan aset tetap kendaraan dinas pada Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Pemerintah Kota Jayapura berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 17 Tahun 2007

Penelitian yang dilakukan oleh Jayani, dkk (2019) berjudul “Pengambilan Keputusan Penghapusan Aset BMN berupa Kendaraan Dinas Operasional dengan kondisi Rusak (Studi Kasus Pada Satuan Kerja Pelaksanaan Jalan Nasional Metropolitan I Surabaya)”. Metode yang digunakan yaitu kualitatif dengan deskriptif analisis. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis pengambilan keputusan penghapusan Aset BMN berupa KDO dengan kondisi rusak pada pelaksanaan Jalan Nasional Metropolitan I Surabaya.

Penelitian yang dilakukan oleh Maharani, dkk (2019) berjudul “Manajemen Aset Pemerintah Daerah (Studi Tentang Manajemen Aset Kendaraan Dinas Berdasarkan Permendagri Nomor 19 Tahun 2016 Pada Biro Perlengkapan Sekretariat Daerah Provinsi Lampung Tahun 2019)”. Metode yang digunakan yaitu deskriptif kualitatif. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui Biro Perlengkapan Sekretariat Daerah Provinsi Lampung dalam menjalankan manajemen aset sesuai dengan Permendagri Nomor 19 Tahun 2016.

Penelitian yang dilakukan oleh Botutihe (2018) berjudul “Analisis Mekanisme Penggunaan Kendaraan Operasional Pada Kantor Sekretariat Daerah Kota Gorontalo”.

Metode yang digunakan yaitu kuantitatif. Bertujuan untuk mengetahui mekanisme penggunaan kendaraan operasional pada kantor Sekretariat Daerah Kota Gorontalo serta mengidentifikasi usaha-usaha apa yang dilakukan Kantor Sekretariat Daerah Kota Gorontalo.

Penelitian yang dilakukan oleh Elimiyati (2022) berjudul “Analisis Sistem Pemeliharaan Kendaraan Dinas Operasional di Kantor Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) Provinsi Riau”. Metode yang digunakan yaitu kualitatif deskriptif. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisa sistem pemeliharaan pada kendaraan dinas operasional yang terdapat pada kantor Satuan Pamong Praja Provinsi Riau serta untuk mengetahui kendala yang dihadapi dalam pelaksanaan pemeliharaan pada kendaraan dinas operasional.

Penelitian yang dilakukan oleh Aryani, dkk (2017) berjudul “Sistem Informasi Pengelolaan Aset Kendaraan Bermotor Pada STMIK Raharja Tangerang”. Metode yang digunakan kualitatif deskriptif. Bertujuan untuk mengetahui sistem informasi pengelolaan aset kendaraan bermotor pada STMIK Raharja Tangerang.

Penelitian yang dilakukan oleh Idafrion (2020) berjudul “Explorasi Solusi Permasalahan Manajemen Aset Kendaraan Dinas Roda Empat Pada Badan Pengelolaan Keuangan Aset Daerah Kabupaten Rokan Hulu”. Metode yang digunakan yaitu kualitatif deskriptif. Bertujuan untuk mengetahui penggunaan, penatausahaan dan pemeliharaan kendaraan dinas roda empat pada Badan Pengelolaan Keuangan Aset Daerah Kabupaten Rokan Hulu.

1.4. Pernyataan Kebaruan Ilmiah

Penulis melakukan penelitian yang berbeda dan belum dilakukan oleh penelitian terdahulu, dimana konteks penelitian yang dilakukan oleh penulis yaitu pengamanan aset kendaraan dinas. Pengukuran/indikator yang digunakan juga berbeda dengan penelitian Angreny, Andry, Khaerunnisa, Wambrauw, Jayani, maharanil, Botutihe, Elmiyati, Aryani, dan Idafrion dimana indikator yang digunakan dimana penulis lebih memfokuskan bagaimana optimalisasi pengamanan dari aset kendaraan dinas. Untuk segi lokasi penelitian yang digunakan pada penelitian ini juga berbeda dari penelitian sebelumnya.

1.5. Tujuan.

Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan optimalisasi pengamanan aset kendaraan dinas, menganalisis faktor penghambat dan pendukung, serta mendeskripsikan upaya BPKAD dalam mengatasi permasalahan

II. METODE

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif deskriptif dengan pendekatan induktif yaitu metode-metode untuk mengeksplorasi dan memahami makna yang oleh sejumlah individu atau sekelompok orang dianggap berasal dari masalah atau kemanusiaan (Creswell, 2016). Penelitian ini menggunakan dua sumber data yaitu data primer dan data sekunder (Sugiono, 2015). Menurut Creswell (2023: 261) bahwa “researcher as key instrumen” (peneliti merupakan instrumen kunci). Penulis melakukan pengumpulan data melalui wawancara, dokumentasi dan observasi. Pengumpulan data melalui wawancara dilakukan dengan 4 (empat) informan yang terdiri dari Kabid Penatausahaan Aset, Kasubbid Pemanfaatan dan Pegamanan Aset, serta Pengurus Barang OPD (Dinas Kesehatan dan Sekretariat Daerah). Teknik analisis data yang dilakukan yaitu teknik analisis data Miles dan Huberman dalam Sayidah (2018) menjelaskan bahwa “dalam pandangan model interaktif terdapat tiga jenis kegiatan analisis (reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan) dan pengumpulan data itu sendiri merupakan proses interaktif”.

III. HASIL DAN PEMBAHASAN

3.1. Optimalisasi Pengamanan Aset Kendaraan Dinas di Kabupaten Indragiri Hulu

Menurut Suwanda (2015: 284) menjelaskan bahwa “pengamanan administrasi meliputi kegiatan pencatatan, pembukuan, inventarisasi, pelaporan dan penyimpanan dokumen kepemilikan”.

A. Pengamanan Administrasi

Pengamanan administrasi meliputi kegiatan pencatatan, pembukuan, inventarisasi, pelaporan serta penyimpanan dokumen kepemilikan. Pengamanan administrasi pada aset kendaraan dinas di Kabupaten Indragiri Hulu yang dilakukan dengan pencatatan dan inventarisasi jumlah aset dan Kartu Inventaris Barang (KIB B), penggunaan sistem aplikasi dalam pencatatan dan inventarisasi, pencatatan dan inventarisasi surat permohonan penggunaan barang dan daftar pengguna barang, inventarisasi bukti kepemilikan dan kartu pemeliharaan di Kabupaten Indragiri Hulu sudah dilaksanakan dengan baik, akan tetapi masih terdapat beberapa permasalahan yaitu bukti kepemilikan kendaraan dinas roda dua (BPKB) masih disimpan oleh pengguna barang sehingga berakibat terjadinya permasalahan terkait pembayaran pajak serta belum adanya kartu pemeliharaan sebagai pengendali biaya pemeliharaan.

B. Pengamanan Hukum

Menurut Suwanda (2015: 284) menjelaskan pengamanan hukum meliputi kegiatan melengkapi bukti kepemilikan atas nama pemerintah daerah. Indikator pengamanan hukum yang dilakukan yaitu pengurusan bukti kepemilikan dan pelunasan pajak, pemrosesan tuntutan ganti rugi sesuai dengan ketentuan peraturan, serta penertiban dan

penarikan kendaraan dinas dari pegawai mutasi dan pensiun. Pengamanan hukum aset kendaraan dinas di Kabupaten Indragiri Hulu belum dilaksanakan dengan baik dikarenakan bukti kepemilikan kendaraan dinas roda dua masih di simpan oleh masing-masing pengguna barang sehingga pembayaran pajak sering tertunda dan masih terdapat kendaraan dinas yang dibawa oleh pegawai mutasi dan pensiun.

C. Pengamanan Fisik

Menurut Suwanda (2015: 284) menjelaskan bahwa “pengamanan barang milik daerah secara fisik bertujuan untuk mencegah terjadinya penurunan fungsi, penurunan jumlah barang dan hilangnya barang”. Indikator pengamanan fisik di Kabupaten Indragiri Hulu dilakukan dengan membuat atau memasang stiker/plakat/tanda lainnya, serta tempat penyimpanan aset kendaraan dinas. Pengamanan fisik aset kendaraan dinas di Kabupaten Indragiri Hulu belum terlaksana dengan baik dikarenakan belum terdapatnya tanda kepemilikan berupa stiker pada kendaraan dinas pribadi dan hanya terdapat pada kendaraan dinas operasional berupa bus dan ambulance, serta belum terdapat tempat parkir kendaraan dinas yang aman sehingga harus dibawa dan disimpan oleh masing-masing pengguna barang dan belum terdapat gudang barang untuk kendaraan dinas roda empat pada masing-masing OPD sehingga masih terdapat kendaraan dinas rusak di parkir di luar ruangan (tidak terawat).

Berdasarkan hasil di atas dapat disimpulkan bahwa pengamanan aset kendaraan dinas di Kabupaten Indragiri Hulu sudah berjalan akan tetapi masih terdapat permasalahan terutama pada pengamanan Hukum dan Pengamanan Fisik yang masih terdapat banyak kekurangan dan belum sesuai dengan peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah.

3.2. Faktor Penghambat dan Faktor Pendukung Optimalnya Pengamanan Aset Kendaraan Dinas

A. Pengamanan Administrasi

Pengamanan administrasi telah dilakukan dengan baik dan hanya terdapat beberapa permasalahan terkait penyimpanan bukti kepemilikan. Hal ini tentunya dikarenakan faktor penghambat dan faktor pendukung optimalnya pengamanan administrasi. Faktor penghambat yaitu dikarenakan kurangnya kesadaran pengguna barang, serta kurangnya sumber daya manusia pada BPKAD terkhususnya pada Bidang Pengelolaan Aset. Faktor pendukung yaitu peran Kepala Bidang Pengelolaan Aset sebagai penggerak dan pembuat kebijakan terkait pengamanan administrasi pada aset.

B. Pengamanan Hukum

Pengamanan hukum pada Kabupaten Indragiri Hulu belum dilaksanakan dengan baik dikarenakan masih terdapatnya permasalahan terkait bukti kepemilikan dan penggunaan aset kendaraan dinas oleh pegawai mutasi dan pensiun, hal ini tentunya tidak terlepas dari faktor penghambat dan faktor pendukung. Faktor penghambat yaitu

kurangnya kesadaran serta tanggung jawab pengguna barang, sedangkan faktor pendukung yaitu peran Kepala Bidang Pengelolaan Aset.

C. Pengamanan Fisik

Pengamanan fisik pada Kabupaten Indragiri Hulu belum terlaksana dengan baik dikarenakan masih terdapat permasalahan diantaranya kurangnya anggaran dalam keamanan tempat parkir serta gudang barang kendaraan roda empat untuk masing-masing OPD dan tidak terdapatnya stiker pada kendaraan dinas pribadi, hal ini dikarenakan faktor penghambat terlaksananya hal tersebut yaitu kurangnya anggaran serta kebijakan Kepala Bidang terkait pemasangan tanda kepemilikan berupa stiker.

3.3. Upaya yang Dilakukan oleh Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Solusi dari Permasalahan Aset Kendaraan Dinas

A. Pengamanan Administrasi

BPKAD dalam melaksanakan pengamanan administrasi aset kendaraan dinas di Kabupaten Indragiri Hulu melakukan beberapa upaya yaitu pembuatan sistem aplikasi, penyimpanan bukti kepemilikan (BPKB) kendaraan dinas roda empat, penyimpanan daftar pengguna barang dan BAST pengguna barang.

B. Pengamanan Hukum

Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Indragiri Hulu terus melakukan upaya dalam meningkatkan optimalisasi pengamanan aset kendaraan dinas, adapun upaya yang dilakukan yaitu BPKAD bekerjasama dengan kantor samsat terkait pembayaran pajak, memberikan himbauan kepada pengguna barang kendaraan dinas roda dua untuk melakukan pembayaran pajak, membuat kebijakan terkait pemrosesan tuntutan ganti rugi kendaraan dinas, mengeluarkan surat penertiban ke OPD terkait kendaraan dinas yang dibawa pegawai mutasi dan pensiun, serta membentuk tim Satgas untuk menyelesaikan permasalahan apabila OPD tidak sanggup untuk memenuhi kebijakan penertiban barang yang dibawa pegawai mutasi dan pensiun.

C. Pengamanan Fisik

Pengamanan fisik aset kendaraan dinas di Kabupaten Indragiri Hulu belum optimal hal ini dikarenakan masih belum terdapat stiker pada aset kendaraan dinas pribadi serta belum terdapat gudang barang kendaraan dinas roda empat pada masing-masing OPD sehingga Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Indragiri Hulu melakukan upaya berupa penyimpanan aset kendaraan dinas baik pribadi maupun operasional ke gudang barang milik daerah.

3.4. Diskusi Temuan Utama Penelitian

Pengamanan aset kendaraan dinas di Kabupaten Indragiri Hulu memiliki perananan penting untuk menjaga agar kendaraan dinas dapat digunakan untuk memberikan pelayanan kepada Masyarakat Kabupaten Indragiri Hulu. Penelitian yang dilakukan oleh

Andry, dkk (2023) hasil dari penelitian ini bahwa koordinasi antara kedua instansi telah dilakukan, namun masih terdapat hal-hal yang belum berjalan maksimal diantaranya: (1) Koordinasi mempersiapkan surat-surat kendaraan baik sebelum dihapus maupun telah dihapus, (2) Komunikasi yang lebih instensif, (3) Kemampuan pegawai, (4) Partisipasi secara maksimal. Sama halnya dengan penelitian sebelumnya bahwa kemampuan pegawai sangat berpengaruh akan tujuan berjalan maksimal.

Penelitian yang dilakukan oleh Khaerunnisa dan Hoerudin (2022) hasil penelitian menunjukkan bahwa pengelolaan kendaraan dinas Kabupaten Bogor telah dilakukan sesuai dengan Permendagri Nomor 19 Tahun 2016. Namun, masih terdapat kendala yaitu masalah aset yang tidak lengkap dan tidak akurat. Sama halnya dengan penelitian sebelumnya bahwa terdapat permasalahan pada aset yang tidak lengkap, akan tetapi pada penelitian ini pengamanan aset kendaraan dinas di Kabupaten Indragiri Hulu belum terlaksana dengan baik sesuai Permendagri 19 Tahun 2016.

Penelitian yang dilakukan oleh Wambrau (2020) hasil penelitian menjelaskan bahwa penyebab permasalahan penatausahaan aset tetap kendaraan dinas melalui sistem informasi manajemen barang milik daerah pada BPKAD Kota Jayapura ditinjau dari 5 (lima) sisi yaitu: (1) Sisi administrasi, (2) Keuangan, (3) Birokrasi, (4) Sumber daya manusia, (5) sistem informasi. Sama halnya dengan penelitian sebelumnya bahwa administrasi, keuangan, sumber daya manusia, dan sistem informasi berpengaruh terhadap optimalnya pengamanan aset kendaraan dinas di Kabupaten Indragiri Hulu

Penelitian yang dilakukan oleh Jayanti, dkk (2019) hasil penelitian menjelaskan bahwa dari kelima aset BMN berupa kendaraan dinas operasional tersebut, dengan rincian tiga sepeda motor dan dua mobil dengan tingkat kerusakan berbeda-beda maka didapatkan hasil tiga sepeda motor dapat dilakukan penghapusan dan dua mobil dilakukan perbaikan. Berbeda dengan penelitian sebelumnya bahwa kendaraan dinas rusak pada masing-masing OPD belum dilakukan perbaikan maupun dilakukan penghapusan.

Penelitian yang dilakukan oleh Angreni (2022) hasil penelitian menjelaskan bahwa aset tanah belum optimal, terdapat beberapa tanah belum memiliki sertifikat, hilangnya patok/ rusaknya tanda kepemilikan, tanah belum terdaftar sehingga pengamanan aset belum terlaksana sesuai dengan Permendagri 19 Tahun 2016. Sama halnya dengan penelitian sebelumnya pada penelitian ini pengamanan aset kendaraan dinas belum terlaksana sesuai dengan peraturan yang ada.

Penelitian yang dilakukan oleh Maharani, dkk (2019) hasil penelitian menjelaskan bahwa Biro Perlengkapan sebagai pembantu mengelola barang sudah baik dalam menjalankan tugasnya dengan mengikuti prosedur dalam Permendagri Nomor 19 Tahun 2016.

Penelitian yang dilakukan oleh Botutihe (2018) hasil penelitian menjelaskan bahwa (1) mekanisme pemanfaatan kendaraan operasional di lingkungan kantor Sekretariat Daerah Kota Gorontalo mencapai 78,33 %, (2) mekanisme peminjaman kendaraan operasional di lingkungan Sekretariat Daerah belum menampilkan hasil yang memuaskan, (3) meninjau perolehan rata-rata persentase alternatif jawaban yang diperoleh mencapai 77,78. Hasil ini mengasumsikan bahwa mekanisme pengamanan kendaraan operasional di lingkungan kantor Sekretariat Daerah Kota Gorontalo belum sesuai harapan yang diinginkan.

Penelitian yang dilakukan oleh Elmiyati (2022) hasil penelitian menjelaskan bahwa sistem pemeliharaan kendaraan dinas operasional pada Satpol PP Provinsi Riau berubah-ubah menyesuaikan kondisi dan situasi, hal tersebut terjadi karena terdapat beberapa kerusakan yang tidak terduga di luar perkiraan dan jangkauan pihak ketiga (bengkel serta terjadi karena karena terdapat beberapa hal yang menjadi kendala.

Penelitian yang dilakukan Aryani, dkk (2017) hasil penelitian yaitu penggunaan sistem informasi aset dapat melakukan pemrosesan data yang diinput dari perangkat-perangkat yang di program sebagai media inputan memberikan kemudahan petugas dalam mengelola dan membuat laporan manajemen aset kendaraan sehingga mampu mengatasi kesulitan dalam mencari data yang diinginkan dan keterlambatan dalam pembuatan laporan karena dalam pengecakan data, pencarian data dan pembuatan laporan juga menjadi lebih mudah tanpa harus mencari kembali berkas-berkas yang telah di simpan sebelumnya.

Penelitian yang dilakukan oleh Idafrion (2020) hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pengelolaan Mobil Dinas Pemerintah Kabupaten Rokan Hulu oleh Badan Aset belum sesuai dengan peraturan pemerintah Nomor 27 Tahun 2014.

3.5. Diskusi Temuan Menarik Lainnya

Penulis menemukan faktor penghambat lainnya dalam penertiban aset kendaraan dinas yang dibawa oleh pegawai mutasi dan pensiun yaitu belum terdapatnya nomor rangka dan nomor mesin sebagai bukti kuat kepemilikan aset kendaraan dinas milik Kabupaten Indragiri Hulu

IV. KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan pada Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Indragiri Hulu, maka diambil kesimpulan sebagai berikut :

- 1 Pengamanan aset kendaraan dinas di Kabupaten Indragiri Hulu baik pengamanan administrasi, pengamanan hukum, pengamanan fisik pada aset kendaraan dinas belum optimal dan belum sesuai dengan Permendagri Nomor 19 Tahun 2016 dikarenakan masih terdapat bukti kepemilikan yang hilang, pembayaran pajak yang menunggak, tanda kepemilikan berupa stiker yang tidak ada, serta tempat

- penyimpanan barang baik tempat parkir maupun gudang barang yang belum optimal.
- 2 Terdapat Fakot pendukung dan penghambat optimalisasi pengamanan aset kendaraan dinas yaitu peran pimpinan sebagai pembuat kebijakan, sumber daya manusia, mutasi pegawai, anggaran, tanggungjawab pengguna barang, serta kemampuan pegawai
 - 3 Upaya yang dilakukan oleh BPKAD Kabupaten Indragiri Hulu diantaranya yaitu Surat penertiban kendaraan dinas untuk OPD, melakukan kerja sama dengan kantor samsat untuk pembayaran pajak, pembentukan tim Satuan Tugas untuk penyelesaian permasalahan terkait penertiban barang, pembuatan aplikasi untuk pencatatan dan inventarisasi, melakukan pencatatan 5 OPD setiap tahunnya untuk mengatasi keterbatasan SDM, menyimpan bukti kepemilikan kendaraan dinas roda empat sebagai bentuk pengamanan fisik, memberikan kebijakan penyimpanan kendaraan dinas oleh masing-masing pengguna barang dan penyimpanan kendaraan dinas rusak ke gudang barang milik daerah

Keterbatasan Penelitian. Penelitian ini memiliki keterbatasan utama yakni waktu dan biaya penelitian serta izin pengumpulan data dikarenakan banyak terdapat data yang belum lengkap.

Arah Masa Depan Penelitian (*future work*). Penulis menyadari masih awalnya temuan penelitian, oleh karena itu penulis menyarankan agar dapat dilakukan penelitian lanjutan pada lokasi serupa berkaitan dengan optimalisasi pengamanan aset kendaraan dinas dengan menggunakan metode studi kasus agar lebih memperdalam pengumpulan data terkait pengamanan aset kendaraan dinas di Kabupaten Indragiri Hulu

V. UCAPAN TERIMA KASIH

Ucapan terima kasih terutama ditujukan kepada Kepala Bidang Pengelolaan aset beserta jajarannya yang telah memberikan kesempatan dan bantuan kepada penulis saat melaksanakan penelitian di BPKAD Kabupaten Indragiri Hulu, serta seluruh pihak yang membantu mensukseskan pelaksanaan penelitian dan pembuatan skripsi ini,

VI. DAFTAR PUSTAKA

- Andry, H. dkk. 2023. “*PELAKSANAAN KOORDINASI DINAS KESEHATAN KOTA PEKANBARU DAN BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH KOTA PEKANBARU DALAM PENGHAPUSAN ASET KENDARAAN DINAS OPERASIONAL KHUSUS (AMBULANCE)*”, Jurnal Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik (JISIP) Vol 12, Pekanbaru
- Angreni, R., 2022. “*Optimalisasi Pengamanan Aset Tetap Daerah oleh Pemerintah Kota Tanjungpinang Provinsi Kepri*”. Jurnal Ilmiah, Jatinangor
- Aryani, D., dkk. 2017. *Sistem Informasi Pengelolaan Aset Kendaraan Bermotor pada STMIK Raharja Tangerang*. Jurnal ilmiah Vol. 3, Tangerang.

- Botutihe, N., 2018. *Analisis Mekanisme Penggunaan Kendaraan Operasional Pada Kantor Sekretariat Daerah Kota Gorontalo*. Jurnal Ilmu Administrasi Vol.6, Gorontalo
- Creswell, J. W., 2016. *Research design. Terjemahan Edisi 4 (4th ed.)*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- , 2023. *Research Design (6th ed.)*. London: Sage Publications
- Elmiyati, 2022. *Analisis Sistem Pemeliharaan Kendaraan Dinas Operasional di Kantor Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) Provinsi Riau*. Thesis, Riau
<https://riau.bpk.go.id/> *Penyerahan Laporan Hasil Pemeriksaan Kinerja atas Efektivitas Manajemen Aset pada Pemerintah Kabupaten Indragiri Hulu Tahun 2021 dan 2022 (s.d. Semester I)*. 22 November 2022
- Idafrion, 2020. *Explorasi Solusi Permasalahan Manajemen Aset Kendaraan Dinas Roda Empat Pada Badan Pengelolaan Keuangan Aset Daerah Kabupaten Rokan Hulu*. Jurnal Ilmiah Manajemen dan Bisnis Vol.2, Riau
- Ilmiah, J. dkk. “*PENGAMANAN ASET BERUPA TANAH MILIK PEMERINTAH KABUPATEN CIAMIS*”, Jurnal Ilmiah Galuh Justisi Vol. 10, Ciamis
- Jayanti, R. S. dkk 2019. “*PENGAMBILAN KEPUTUSAN PENGHAPUSAN ASET BMN (BARANG MILIK NEGARA) BERUPA KDO (KENDARAAN DINAS OPERASIONAL) DENGAN KONDISI RUSAK (STUDI KASUS PADA SATUAN KERJA PELAKSANAAN JALAN NASIONAL METROPOLITAN I SURABAYA)*”. Jurnal Akuntansi dan Ekonomi Vol. 4, Surabaya
- Khaerunnisa, F. dan C. W. Hoerudin. 2022. “*Pengelolaan Kendaraan Dinas Dalam Mewujudkan Tertib Administrasi Pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Bogor*”. Jurnal Birokrasi Dan Pemerintahan Daerah Vol. 4, Bogor
- Maharanil, R. A., dkk. 2019. *Manajemen Aset Pemerintah Daerah (Studi Tentang Manajemen Aset Kendaraan Dinas Berdasarkan Permendagri Nomor 19 Tahun 2016 pada Biro Perlengkapan Sekretariat Daerah Provinsi Lampung Tahun 2019)*. Jurnal Birokrasi, Kebijakan dan Pelayanan Publik Vol. 2, Lampung.
- Sayidah, N., 2018. *Metodologi Penelitian*. Jakarta: Zifatama Jawa.
- Sugiono 2019. *Metode penelitian dan pengembangan (research and development/R&D)*. Bandung: Alfabeta
- Suwanda, D., 2015. *Optimalisasi Pengelolaan Aset Pemda*. Bandung: PPM.
- Wambrauw, M. P., 2020. “*Analisis Penatausahaan Aset Tetap Kendaraan Dinas Melalui Sistem Informasi Manajemen Barang Milik Daerah (Studi pada Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Pemerintah Kota Jayapura)*”. *Accounting and Business Information Systems Journal*, Yogyakarta
- Wicaksana, A. dkk. 2021. “*Pengaruh inventarisasi aset, penggunaan aset, pengamanan dan pemeliharaan aset terhadap optimalisasi aset tetap tanah pada pemerintah Kabupaten Malang*”. Jurnal Ilmu Administrasi Publik Vol. 6, Malang